

TAJUK RENCANA

Percepatan Pancamulia

PELANTIKAN Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Penjabat Walikota Yogyakarta, dan Penjabat Bupati Kulonprogo, Senin 22 Mei 2023, menjadi momentum peneguhan tekad untuk mempercepat perwujudan Visi Misi Pemda DIY 2022-2027, yakni Pancamulia Melalui Reformasi Kalurahan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa Beny Suharsono yang baru saja dilantik menjadi Sekda DIY harus mampu mewujudkan Pancamulia Melalui Reformasi Kalurahan.

Ada enam point yang ditekankan oleh Sri Sultan, yakni tingkat kemiskinan yang semakin kecil; kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan; lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram; kehidupan ekonomi yang layak; ketimpangan antarkelas sosial dan antarwilayah yang semakin kecil; dan good-governance di berbagai tingkatan.

Keenam point tersebut, diharapkan bisa mewarnai pelaksanaan Reformasi Kalurahan yang saat ini sudah mencapai tahap urgensi implementasi. Menurut gubernur, ujung tombak peningkatan kesejahteraan rakyat sejatinya memang tergantung pada mobilisasi di tingkat kalurahan. Diungkapkan pula, semua itu harus didukung bukti dan parameter yang jelas. Mulai dari pemilihan variabel, indikator, dan metode pengukuran *outcome* yang tepat.

Sebagaimana diketahui, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2022-2027 adalah Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sedangkan misinya adalah: Mereformasi kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan warga, pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan; Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan du-

kungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, perlindungan/pengeolaan sumber daya setempat; Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi; Melesatkan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanian yang lebih baik.

Juga telah dijabarkan, Panca-mulia adalah: Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupam-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban; Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal; Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama, baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi; Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparat sipil penyelenggara pemerintahan.

Menurut gubernur, Sekda wajib bertindak sebagai komunikator pemerintah, khususnya Pemda DIY. Untuk itu Sekda DIY perlu memiliki kearifan dengan turut melestarikan nilai-nilai budaya dan Keistimewaan Yogyakarta. Sekda juga harus berperan dalam mengakselerasi pembangunan, khususbya DIY Bagian Selatan, serta berbagai pembangunan infrastruktur pemerintahan daerah untuk lebih memakmurkan masyarakat DIY.

Kepada Beny Suharsono, gubernur juga berpesan agar jabatan Sekda dimaknai sebagai amanah yang perlu *netepi laku handayani hanyakra purana*, yaitu upaya memberikan motivasi. Sekda juga perlu berperan selayaknya *sumur sinaba*.

Dalam era Reformasi Kalurahan ini, mestinya Sekda juga perlu berlaku layaknya *sumur lumaku tinimba*. Sebab, peran Sekda dalam percepatan mewujudkan Pancamulia sudah ditunggu oleh 392 kalurahan yang ada di DIY. □-d

Pengurangan Risiko Bencana bagi Penyandang Disabilitas

PENYANDANG disabilitas memiliki kedudukan hukum dan hak asasi yang sama dengan warga negara lainnya untuk hidup maju dan bermartabat. Data Bappeda DIY, jumlah penyandang disabilitas di DIY yang dikategorikan membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) tahun 2023 sebanyak 28.137. Sedang DIY merupakan daerah rawan bencana dengan tingkat risiko sedang, dan dua kabupaten yaitu Kulonprogo dan Bantul memiliki tingkat risiko tinggi (BNPB, 2022).

Risiko bencana bahkan lebih besar bagi populasi rentan, termasuk penyandang disabilitas. Mereka menghadapi hambatan yang signifikan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi terkait bencana. Selanjutnya akan menghambat keterlibatan dan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Pengguna kursi roda merasa sulit untuk terlibat dalam kegiatan di luar rumah mereka karena lingkungan yang tidak dapat diakses. Sementara individu dengan gangguan penglihatan memiliki akses terbatas ke informasi dan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana.

Partisipasi Inklusif

Konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak mengungkapkan bahwa lingkungan tidak cukup mendukung partisipasi kelompok berisiko dalam siklus manajemen bencana. Namun, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menekankan pentingnya aksesibilitas untuk memenuhi hak-hak dasar mereka dan memungkinkan partisipasi dalam pengurangan risiko bencana.

Kelompok berisiko harus dapat memanfaatkan fasilitas umum dan menerima akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas individu. Aksesibilitas mencakup desain produk, program, dan layanan lingkungan yang dapat digunakan oleh semua orang semaksimal mungkin.

Perlu adanya upaya advokasi yang berkelanjutan dalam meningkatkan ke-

M Taufiq AR

sadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif. Sehingga dapat mendorong perubahan dalam perencanaan dan pengembangan layanan publik yang lebih inklusif, ramah disabilitas, dan dapat diakses oleh semua warga.



KR-JOKO SANTOSO

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan panduan atau alat untuk membantu mengidentifikasi dan memeriksa secara kritis aksesibilitas produk, program, dan layanan lingkungan untuk kelompok berisiko. Panduan ini juga akan mencakup fasilitas umum, seperti posko pengungsian pascapandemi. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dapat menginformasikan upaya perencanaan ke depan.

Pengurangan Risiko

Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY (FPRB DIY) bekerja sama dengan YEU (YAKKUM Emergency Unit) dalam 3 tahun terakhir mengadvokasi pengurangan risiko bencana yang inklusif berbasis kepemimpinan masyarakat untuk mempercepat penyebaran informasi. Upaya advokasi kolektif ini bertujuan

untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana yang inklusif sangat penting untuk memastikan kesetaraan partisipasi dan perlindungan penyandang disabilitas. Kolaborasi segenap pihak, dalam pengurangan risiko bencana merupakan inisiatif yang patut diacungi jempol.

Secara praktis panduan atau alat untuk menilai aksesibilitas, produk, program, dan layanan lingkungan dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua individu. Termasuk penyandang disabilitas dapat menjadi instrument bersama untuk menilai, memperbaiki, dan menjadi aksesibilitas yang inklusif dan universal. Tentu dari berbagai sarana prasarana layanan publik bagi seluruh warga, utamanya kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Penting untuk memprioritaskan pengurangan risiko bencana yang inklusif dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Melalui upaya advokasi kolektif dan kerja sama lintas sektor, DIY pada khususnya dan Indonesia pada umumnya niscaya dapat mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan tangguh, di mana setiap individu, terlepas dari kemampuannya, dapat berkontribusi aktif dalam pengurangan risiko bencana dan pembangunan secara keseluruhan. □-d

*) **M Taufiq AR**, Ketua Forum

Pengurangan Risiko Bencana DIY, Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PWM DIY.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pariwisata Gunungkidul, Berkah yang Kurang Disyukuri

Darmanto

pakain bukti. Geliat wisata atas pantai tersebut tidak digerakkan Pemkab melainkan buah kegigihan dan kreativitas perorangan pemilik warung/caff  Indrayanti dalam mempromosikan daerah wisata agar warungnya laris. Seandainya popularitas pantai tersebut wujud kinerja Pemkab tentu yang terkenal nama Pulau Syawal. Munculnya konflik pengelolaan lokasi wisata Goa Pindul dan Pantai Gesing tanpa penyelesaian holistik dan berjangka panjang merupakan cermin tidak adanya desain tata kelola yang baik dan visioner.

Ketidakjelasan tata kelola juga dapat dilihat dalam hal pengelolaan retribusi dan parkir seperti terjadi di Gesing. Wisatawan yang akan masuk di kompleks wisata Gesing wajib membayar retribusi di loket resmi milik Pemkab. Namun, ketika sampai di Pantai Gesing atau kompleks wisata lainnya (kecuali Taman Watu) masih harus membayar parkir. Ketika masuk *venue* seperti Heha Ocean, Puncak Segara, atau lainnya harus membayar tiket lagi yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing pengelola. Hal demikian tidak terjadi di Bali.

Membangun Jalan

Indikator paling mencolok tidak adanya tata kelola yang baik dan peta jalan yang jelas adalah soal infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Belum kelihatan gelagat dari pihak Pemkab Gunungkidul untuk membangun jalan menuju lokasi wisata yang sudah populer. Bahkan jalan menuju Pantai Baron yang sudah terkenal sejak dulu saja sampai

sekarang tidak mengalami perubahan signifikan, tetap sempit dan kurang memadai untuk menuju lokasi wisata yang populer.

Industri pariwisata sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengatasi kemiskinan yang mendera Gunungkidul. Pariwisata memiliki *multiplayer* efek tinggi, membuka ruang kerja di berbagai sektor sehingga dapat mengerem laju urbanisasi. Jika industri pariwisata dikelola secara optimal niscaya akan membuat generasi muda Gunungkidul tidak perlu merantau ke kota-kota lain guna mencari pekerjaan. Karenanya sangat dinantikan komitmen Pemkab untuk membenahi tata kelola pariwisata Gunungkidul. Agar berkembang baik, membuka banyak lapangan kerja, partisipatif, meningkatkan kesejahteraan. Sekaligus mengurangi angka kemiskinan. □-d

*) **Darmanto**, Putra Gunungkidul, peneliti pada Pusat Riset Kebijakan Publik, BRIN

Pojok KR

Ketua PB NU dan Ketua Umum PP Muhammadiyah serukan politik bermoral dalam Pemilu 2024.

-- Ingat dan catat! ***

Mahkamah Konstitusi akhirnya menetapkan masa kerja pimpinan KPK jadi lima tahun.

-- Tambah lama. ***

BNPT melakukan upaya pencegahan terorisme berbasis seni.

-- Seni berbasis budaya.

Beraba

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Jalan Kapten Haryadi Perlu Diperbaiki

KABUPATEN Sleman merupakan wilayah di DIY, yang bisa dikatakan makmur dan maju. Bahkan sebagian besar perguruan tinggi juga ada di wilayah kabupaten ini. Meski hanya *wong cilik*, sebagai warga Sleman saya bangga.

Setiap hari merambah jalanan membuat saya paham, dimana jalan yang baik, terawat atau tidak.

Nah, Jalan Kapten Haryadi adalah salah satunya jalan yang kurang baik. Jalanan bergelombang sangat terasa bila melewati area tersebut.

Apakah kasus tersebut karena struktur tanah atau karena selama ini perbaikan juga hanya tambal sulam? Mungkin, jalan di kawasan ini perlu diperbaiki. □-d

Gatot Amd, Berbah Sleman

Pengemudi Ugal-ugalan di Jalan Raya

PEKAN lalu saya dari arah Utara menuju Yogyakarta. Sampai di simpantiga yang hendak ke Ngluwar (kalau ke kanan), lampu lalu lintas masih merah. Semua berhenti, dari arah Barat kendaraan masih jalan, meski tidak banyak. Tiba-tiba ada truk terseok di sebelah kiri dan kemudian menyalip dan belok ke arah kanan.

Sikap ugal-ugalan itu membuat kami semua kaget, karena tidak

menyangka. Dan lebih tidak menyangka lagi, truk tersebut kemudian ternyata tidak ke Barat tapi putar balik ke Utara. Sayang, saya tidak sempat mencatat plat nomer truk yang sikapnya sangat membahayakan. Saya kian jengkel, melihat dari seberang pengemudi truk tertawa-tawa dengan temannya, karena aksi ugal-ugalan tersebut. □-d

Ir Budi MM, Tuguran Magelang

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tang-gungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.